

**EFEKTIVITAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
DALAM MEMANFAATKAN POKOK-POKOK PIKIRAN (POKIR)
UNTUK MENJAGA PEMILIHNYA STUDI KASUS
DAPIL 6 ACEH TIMUR 2019-2020**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

DANI KURNIAWAN

NIM. 180801054

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dani Kurniawan
NIM : 180801054
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Efektivitas Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
Dalam Memanfaatkan Pokok pikiran Untuk
Menjaga Pemilihnya Studi Kasus Dapil 6
Aceh Timur 2019 - 2020

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Menyerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, Juni 2024

Yang Menyatakan



Dani Kurniawan

**EFEKTIVITAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DALAM
MEMANFAATKAN POKOK PIKIRAN (POKIR) UNTUK MERAWAT
PEMILIHNYA STUDI KASUS DAPIL 6 ACEH TIMUR 2019-2020**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UINAr-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

DANIKURNIWAN

NIM :180801054

Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Sayed Amirul Kamal
NIP.196110051982031007


Arif Akbar, M.A.
NIP.1991110242022031001

**EFEKTIVITAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA) DALAM
MEMANFAATKAN POKOK-POKOK PIKIRAN (POKIR)
UNTUK MENJAGA PEMILIHNYA STUDI KASUS
DAPIL 6 ACEH TIMUR 2019-2020**

SKRIPSI

Di Ajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri
(UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Politik

Oleh:

DANI KURNIAWAN

NIM. 180801054

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Sa'id Amirulkamar, M.M, M.Si

NIP. 196110051982031007

Arif Akbar, M.A

NIP. 199110242022031001

Penguji I,

Penguji II,

Eka Januar, M.Soc.Sc.

NIP. 198401012015031003

Danil Akbar Taqwadin, B.IAM., M.Sc.

NIP. 198904082023211022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muli Mulia, S.Ag., M.Ag

NIP. 197403271999031005

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Efektivitas Dewan Dalam Memanfaatkan Pokok-Pokok pikiran (POKIR) Untuk Menjaga Pemilihnya Studi Kasus Dapil 6 Aceh Timur 2019-2020” Shalawat beriring salam kepada junjungan alam dan suri tauladan Rasulullah *shalallahu'alaihiwasallam* beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah memperjuangkan agama islam di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan dari kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun, agar menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Terima Kasih Kepada Allah SWT. Dan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW.
2. Orang Tua Tercinta dan Keluarga Besar yang telah mendoakan dan menyemangati, baik dari segi material maupun nonmaterial.
3. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
4. Dr. Muji Mulia, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry beserta jajarannya.
5. Rizkika Lhena Darwin M.A selaku Ketua Prodi Ilmu Politik.
6. Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Sayed Amirul Kamal selaku pembimbing I dan Arif Akbar, M.A.selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan selama masa penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

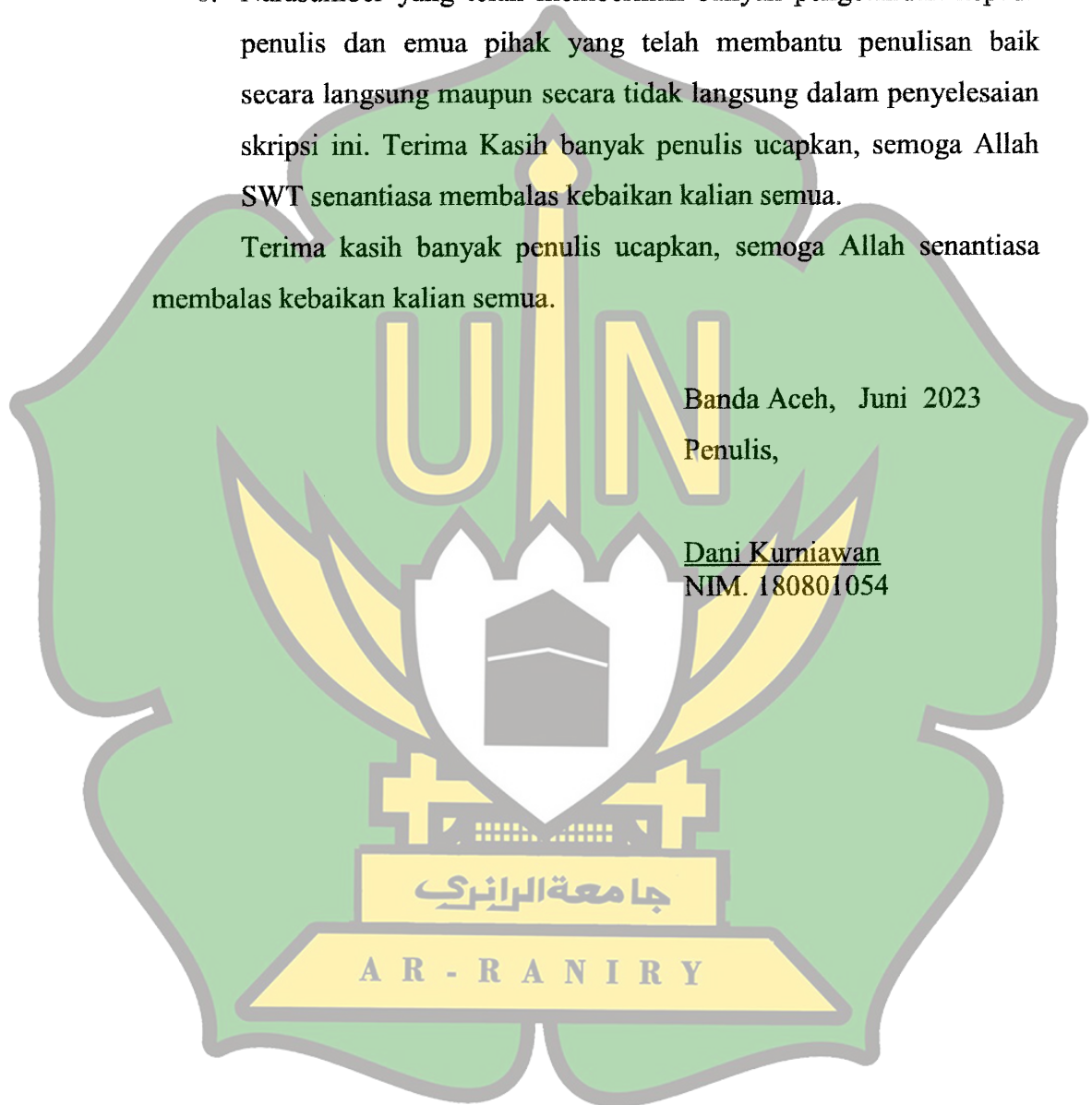
7. Kepada teman-teman seperjuangan Ilmu Politik angkatan 2018 Rafsanjani serta teman-teman penulis yang lain. Dengan motivasi dari kalian semua penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Narasumber yang telah memberikan banyak pengetahuan kepada penulis dan semua pihak yang telah membantu penulisan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Terima Kasih banyak penulis ucapkan, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua.

Terima kasih banyak penulis ucapkan, semoga Allah senantiasa membalas kebaikan kalian semua.

Banda Aceh, Juni 2023

Penulis,

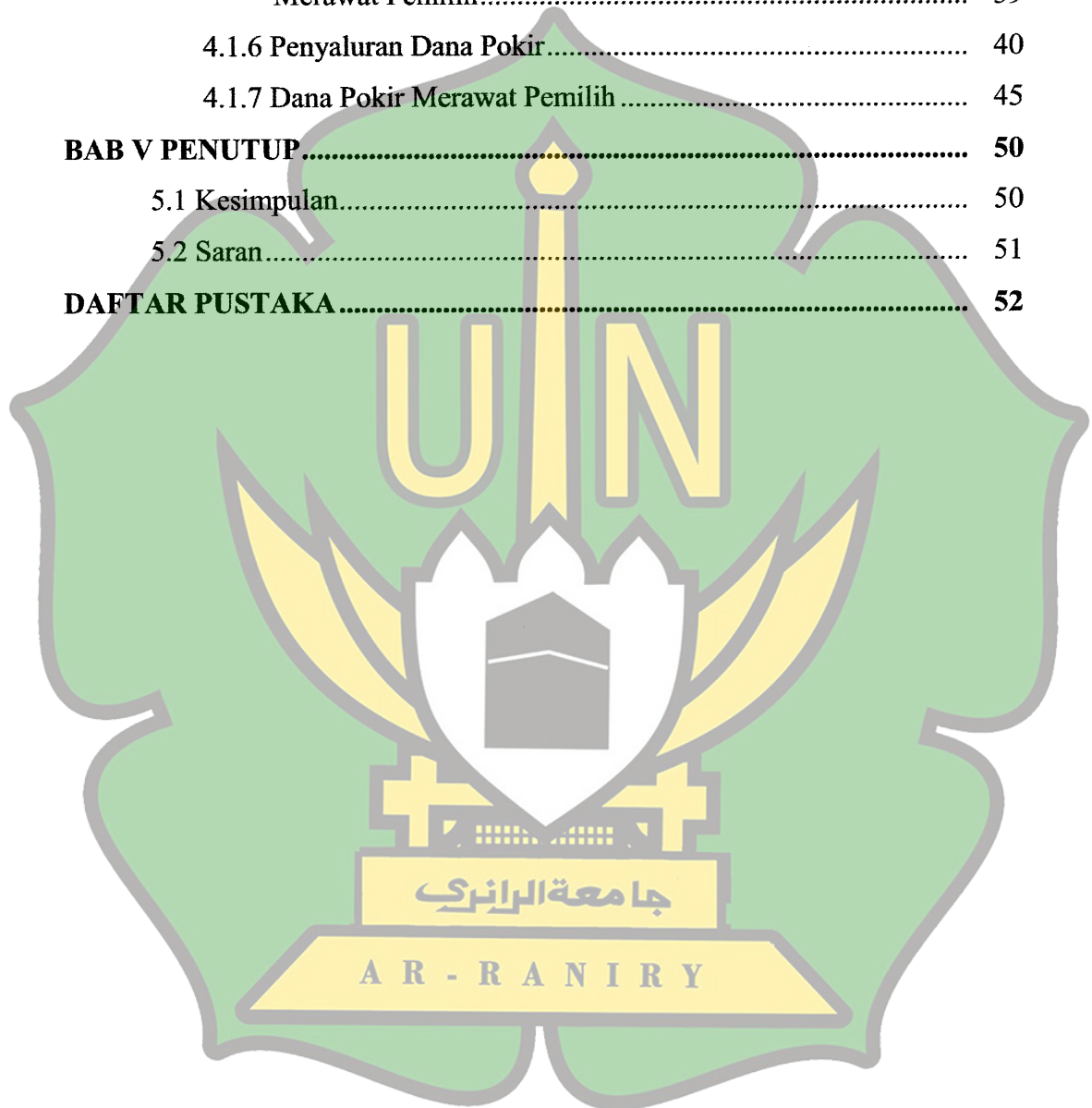
Dani Kurniawan
NIM. 180801054



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Pembahasan Penelitian Yang Relevan	8
2.2 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Patron Klien	11
2.1.2 Teori Patronase.....	14
2.1.3 Teori Perwakilan	16
2.1.4 Pokok Pikiran	19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	24
3.1 Pendekatan Penelitian	24
3.2 Fokus Penelitian	25
3.3 Lokasi Penelitian.....	25
3.4 Jenis Dan Sumber Data	26
3.5 Informan Penelitian	26
3.6 Teknik Pengumpulan Data	27
3.7 Teknik Pemeriksaan Dan Keabsahan Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
4.1 Gambaran Umum Penelitian	30
4.1.1 Letak Geografis Kabupaten Aceh Timur	30
4.1.2 Struktur Pemerintahan.....	31

4.1.3 Perwakilan Dpra Dapil 6	32
4.1.4 Profil Singkat 2 Anggota Dpra Aceh Timur	36
4.1.5 Efektifitas Dewan Dalam Pemanfaatan Dana Pokir Untuk Merawat Pemilih.....	39
4.1.6 Penyaluran Dana Pokir.....	40
4.1.7 Dana Pokir Merawat Pemilih	45
BAB V PENUTUP	50
5.1 Kesimpulan.....	50
5.2 Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	52



ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Dani Kurniawan
NIM : 180801054
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Judul : Efektivitas Dewan Perwakilan Rakyat
Dalam Memanfaatkan Pokok pikiran
Untuk Menjaga Pemilihnya Studi Kasus
Dapil 6 Aceh Timur 2019 – 2020
Tebal Skripsi : 58 Halaman
Pembimbing I : Dr.Sayed Amirul Kamal
Pembimbing II : Arif Akbar,M.A.

Efektivitas Dewan Dalam Memanfaatkan Dana pokok pikiran (Pokir) untuk merawat basis pemilih terlihat dalam beberapa program aspirasi Dana Pokir yang diberikan oleh anggota dewan untuk dapil 6 yaitu TgkMurhaban Makam danMuhammad Yunus untuk beberapa jenis program di antaranya Penyaluran Bantuan Mesjid dan pengembangan Santri, Pemberian bantuan Peternakan Lembu serta Pemberian Bantuan Rumah Dhuafa dan Bibit Bagi Petani serta Mesin Jahit. Namun ada beberapa saran yang mesti adanya pengawasan yang menyeluruh sehingga penggunaan dan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Dewan Dalam Memanfaatkan Dana pokok pikiran (Pokir) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta apasaja program yang diberikan dalam merawat basis pemilih di daerah dapil 6. Dalam hal penelitian ini yaitu kabupaten Aceh Timur dan sebagaimana disebutkan dalam Aturan yang menjadi inspirasi atau semangat pengelolaan Dana Pokir diantaranya Undang Undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tentang lembaga dewan adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif supaya di peroleh data secara alamiah (natural) dan menyeluruh. Sesuai dengan data yang diperoleh dari lapangan, dengan mengacu pada teori Pantron klien. Anggota Dewan telah menjalankan semua fungsinya namun belum secara optimal dan menyeluruh. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan program dana pokir untuk merawat basis pemilih dengan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta kelompok. Meskipun dana yang disalurkan masih belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Karena berbagai kendala namun anggota dewan telah menjalankan fungsinya dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di dapil pemilihannya Anggota memiliki kendala diantaranya

adalah pemotongan Anggaran, sehingga banyak yang belum mendapatkan manfaat.

KataKunci: *Anggota dewan, Aspirasi, dana pokok pikira (pokir) dan Masyarakat*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengkaji permasalahan pembangunan daerah, menerima masukan, dan menyampaikan Program dan Kegiatan kepada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan fokus utama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Kajian Pokir sebagaimana diamanatkan Pasal 178 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengkaji persoalan-persoalan terkait pembangunan daerah yang diperoleh dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui analisis risalah rapat dan/atau dengar pendapat pasca jeda aspirasi.

Sebelum usulan disetujui, dilakukan langkah-langkah dalam proses Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai berikut: Sekda membuat rekening, Dewan memasukkan Pokir, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan, dan terakhir usulan disetujui. Aturan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi landasan Pokir. Bukan jumlah uang yang disodorkan dalam pemikiran, namun perebutan ambisi, disitulah letak optimismenya. Tujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah untuk menyediakan dana yang diperlukan bagi pelaksanaan pikir. Selain itu, kemampuan keuangan daerah saat ini sangat lemah. Hal ini menunjukkan bahwa gagasan-gagasan yang diajukan perlu diselesaikan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah.

Mewujudkan prinsip-prinsip desentralisasi asimetris di daerah secara efektif, efisien, legal, ekonomis, dan efisien untuk mencapai tujuan otonomi khusus, yaitu kesejahteraan masyarakat, merupakan titik tolak kegiatan pengelolaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi berbagai hal. sumber pemasukan dan pengeluaran.¹

Adanya pendanaan otonomi yang unik di Provinsi Aceh memungkinkan pemerintah memenuhi seluruh janji kampanyenya, khususnya bagi daerah-daerah yang memiliki pendapatan asli daerah. Struktur pemerintahan yang demokratis dan harmonis, baik melalui hubungan vertikal (pusat-daerah) maupun horizontal (antar daerah), merupakan cita-cita politik yang harus dicapai dengan mengalokasikan status otonomi khusus (desentralisasi asimetris) dan mengucurkan dana. daerah-daerah di Indonesia telah menganut sistem desentralisasi atau otonomi khusus. Wilayah tersebut antara lain Provinsi Aceh, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Provinsi Papua dan Papua Barat. Beberapa faktor mendorong berkembangnya kebijakan simetris, antara lain: Yang pertama adalah kenyataan bahwa kawasan-kawasan unik telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan sejarah yang telah dikodifikasikan dalam konstitusi. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berperan sebagai pengawas dan gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi mempunyai kewenangan penuh atas pengalokasian dana otonomi khusus. Pokir didasarkan pada undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

¹ Dwiajie, R. 2013. Kontribusi Penerimaan Retribusi Sub sektor Perkebunan Terhadap PAD Provinsi Lampung Tahun 2004-2011.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai beberapa tugas, sebagaimana tercantum dalam Pasal 29. Selain mengawasi dan mengatur wilayah, ada juga tugas yang berkaitan dengan anggaran. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berkewajiban mempertahankan harapan dan impian rakyat sesuai Pasal 104. Lebih tegasnya lagi, Pasal 54 mengarahkan Badan Anggaran (Banggar) untuk memberikan rekomendasi dan pandangan yang dikemukakan sebagai konsep utama. Selain itu, tugas utama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah mengawasi dana Pokir. Hal ini untuk memastikan bahwa program yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan lancar, sesuai dengan semua peraturan perundang-undangan yang relevan, dan sesuai dengan harapan masyarakat yang diwakilinya.

Pilihan ini harus didasarkan pada harapan dan impian masyarakat pasca rehat atau berkumpul. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus mempunyai kewenangan menawarkan dana Pokir jika ingin ada. Kecil kemungkinannya kepala daerah bisa langsung mendapatkan dana Pokir yang disarankan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh. Namun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) dan pertimbangan kemampuan keuangan daerah akan melalui kajian dan diselaraskan dengan program prioritas pembangunan. Perlu juga diwaspadai bahwa anggota dewan wajib mengikuti kegiatan reses dan menyerap ambisi. Anggota yang tidak melaksanakan kegiatan reses dan tidak mempunyai aspirasi dari masyarakat yang diwakilinya, dapat dikatakan sebagai wakil rakyat yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan melakukan pengkhianatan terhadap

masyarakat yang diwakilinya.

Dalam rangka memajukan dan memajukan daerah Aceh, khususnya wilayah Aceh Timur, sangat bermanfaat jika ide dan ambisi dewan disalurkan. Pembelian Rumah Duafa menjadi salah satu prioritas pengalokasian dana pokok. Pada tahun 2020, total rumah yang dibangun di Aceh Timur sebanyak 142 unit, Aceh Utara 140 unit, dan Bireuen 105 unit. Kabupaten-kabupaten ini menerima dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Pada saat yang sama, satu hunian merupakan kebutuhan minimum di Kota Sabang dan Kabupaten Aceh Barat Daya. Kami juga ingin mencermati kebijakan ini dan memberikan masukan serta rekomendasi yang bermanfaat agar masyarakat Aceh dapat meningkatkan taraf hidupnya.²

Selain itu, terdapat para dermawan yang berkontribusi secara finansial untuk mendirikan koperasi, yang pada gilirannya memungkinkan koperasi untuk beternak dan menjual berbagai hewan ternak dan barang pertanian kepada anggotanya dan daerah sekitarnya. Pupuk organik, ikan lele, insektisida, penghijauan pakan sapi, sayuran organik, jasa tukang kebun dan kesehatan tanaman, pelatihan dan pemagangan hanyalah beberapa di antara manfaat yang diciptakan oleh Koperasi Peternakan. Pembangunan Ruang Santri Dayah dan infrastruktur untuk kompetisi olahraga sepak bola tingkat kabupaten juga merupakan bagian dari skema serupa di Aceh Timur. Kita tahu, dari enam calon yang berhasil lolos dalam Pilkada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, ada enam orang yang berasal dari Kabupaten Aceh Timur: Tgk Muhammad Yunus M Yusuf

²anggaran-rumah-dhuafa-dan-dayah-fraksi-demokrat-terima-lpj-apba-2020 Tribunsnews

(PA), Iskandar Usman Al Farlaky (PA), Martini (PA), Murhaban Makam (PPP), Muhammad Yunus (Demokrat), dan Ridwan Abubakar (PDA). Usulan pokir juga merinci besar kecilnya pokir.Rekan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRA).³

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti bermaksud ingin meneliti terkait “Efektivitas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)dalam memanfaatkan pokok pikiran untuk menjaga pemilihnya studi kasus dapil 6 Aceh timur 2019 - 2020” Dengan fokus lebih tepatnya terkait dengan realaisasi dana pokir oleh anggota Dewan Perwakilan Aceh di daerah pemilihan dapil 6 Aceh timur.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka diidentifikasi kan masalah dalam penulisan yaitu sebagai berikut :

1.Bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Memanfaatkan Pokok Pokok Pikiran (POKIR) untuk menjaga pemilihnya?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemanfaatan dana pokir dalam menjaga kostituen daerah pemilihannya ?

³[https://aceh.tribunnews.com/2019/08/24/ini-nama-81-anggota-Dewan Perwakilan Rakyat \(DPR\)a-periode-2019-2024-lengkap-dengan-perolehan-suara](https://aceh.tribunnews.com/2019/08/24/ini-nama-81-anggota-Dewan-Perwakilan-Rakyat-(DPR)a-periode-2019-2024-lengkap-dengan-perolehan-suara)

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Untuk itu, kajian ini kami lakukan dengan harapan dapat membuka jalan bagi kajian-kajian selanjutnya di bidang ilmu politik yang mengkaji kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam melindungi kepentingan konstituennya melalui pelaksanaan kekuasaan politik. Untuk membantu pemerintah mengambil keputusan yang lebih baik, kajian ini juga menjadi masukan bagi Dewan Perwakilan Daerah Aceh Dapil 6 Aceh Timur, khususnya terkait dengan kebijakan politik.

2. Manfaat Praktis

- a. Ini mempunyai potensi untuk menambah pengetahuan para sarjana dan berfungsi sebagai sumber untuk penelitian masa depan.
- b. Membantu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah dalam menjalankan tugas sebagai pengelola uang pokir dan menunaikan tanggung jawab sebagai warga negara.
- c. Demi kepentingan masyarakat, mengumpulkan informasi yang memungkinkan mereka mengevaluasi dan menelusuri bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah menggunakan Dana Pokir.

1.5. Penjelasan Istilah

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dan gagasannya dalam agenda rutin tahunan yang telah ditetapkan melalui PP Nomor 16 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang penyusunan peraturan perundang-undangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan aspirasi masyarakat. Tanggung jawab untuk mewujudkan ide-ide ini ada pada anggota dewan. membuahkan hasil di kotak suara.

Dalam konteks ini, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu lebih proaktif dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan yang relevan dan tepat sasaran. Pemahaman yang mendalam mengenai isu-isu lokal dan nasional akan memperkuat legitimasi mereka dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Hal ini pada akhirnya diharapkan mampu memperkuat posisi mereka di parlemen dan meraih dukungan elektoral yang lebih besar.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memainkan peran penting dalam menentukan kebijakan yang tepat dan sesuai untuk kebutuhan masyarakat dalam dinamika demokrasi yang terus berkembang. Anggota legislatif diharuskan untuk memahami secara menyeluruh berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal maupun nasional, seperti ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Setiap masalah ini membutuhkan tindakan nyata dari wakil rakyat.

Kebijakan yang efektif tergantung pada proses legislatif yang baik dan kemampuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menghubungkan aspirasi publik dengan kebijakan yang dibuat. Untuk mencapai hal ini, anggota legislatif harus sangat peka terhadap perubahan sosial di tingkat lokal dan nasional.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus berkonsentrasi pada membangun hubungan jangka panjang dengan warga mereka jika mereka ingin mempertahankan dukungan elektoral dan meningkatkan kepercayaan publik. Ini bukan hanya tentang mendapatkan suara pada pemilu berikutnya, tetapi juga tentang membangun kepercayaan yang abadi melalui keterlibatan dan diskusi yang terbuka. Program pelayanan masyarakat, seperti forum dialog berkala dan kegiatan sosial, serta pendidikan politik dan penyuluhan, dapat membantu anggota DPR lebih dekat dengan masyarakat yang mereka wakili. Hubungan yang berkelanjutan harus memastikan bahwa anggota DPR dapat menerima kritik dan masukan serta bersedia untuk bertanggung jawab atas kebijakan yang mereka buat. Proses ini akan menciptakan citra yang baik tentang mereka sebagai perwakilan rakyat yang dapat diandalkan dan bertanggung jawab.

Selain itu, anggota legislatif harus mengambil pendekatan yang lebih inklusif dengan melibatkan kelompok masyarakat yang berbeda dalam proses pengambilan keputusan. Tidak hanya keterlibatan ini memperluas pandangan tentang perumusan kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang dibuat lebih realistis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas. Anggota DPR dapat membuat kebijakan yang lebih adil dan tepat sasaran dengan mendengarkan

dan mempertimbangkan pendapat dari berbagai pihak. Setiap tindakan yang diambil oleh anggota DPR harus transparan. Transparansi ini dapat dicapai dengan laporan berkala tentang tindakan mereka, memberikan penjelasan tentang alasan keputusan kebijakan tertentu, dan memberikan informasi kepada publik. Dengan cara ini, masyarakat dapat lebih memahami bagaimana kebijakan dibuat dan merasa lebih terlibat dalam pemerintahan. Ini akan mengurangi jarak antara rakyat dan pemerintah.

